



MASTER BUKU AJAR
DAN PENGANTAR



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Junaedi Karso

Biografi



A. Junaedi Karso

Lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah Legal Study Concerning Provision of The Development of Environmental Funds In Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera, (*Res Nolius Law Journal*, 2020) dan Penerapan Tatakalola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV, (*Res Nolius Law Journal*, 2020).

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Watalim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FII Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermediate One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermediate Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.



Anggota IKAPI

0858 5343 1992

eurekamediaaksara@gmail.com

Jl. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202241338



MASTER BUKU AJAR DAN PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A.Junaedi Karso

Hak Cipta Buku Kemenhum dan HAM Nomor : EC00202241338



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**MASTER BUKU AJAR DAN PENGANTAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Penulis : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Tukaryanto, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5382-72-2

No. HKI : EC00202241338

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik
perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan "MASTER BUKU AJAR DAN PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN".

Kami memohon maaf beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait "BUKU AJAR DAN PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN". Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desrtasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Billahit taufiq wallhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

MASTER BUKU AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DAFTAR ISI.....	3
DESKRIPSI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	5
PERTEMUAN PERTAMA : PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	8
PEREMUAN KEDUA : PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN NEGARA.....	13
PERTEMUAN KETIGA : SEJARAH PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	35
PERTEMUAN KEempat : MEMBELA NEGARA.....	42
PERTEMUAN KE LIMA : PROSES PERUBAHAN DEMOKRASIDAN AMANDEMEN DI INDONESIA.....	46
PERTEMUAN KE ENAM : KELEMAHAN UUD 1945 PASCA 4 KALI AMANDEMEN.....	119
PERTEMUAN KE TUJUH : GEO POLITIK KONSTITUSI DI INDONESIA	129
PERTEMUAN KE DELAPAN : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT KONSTITUSI NEGARA	147
PERTEMUAN KE SEMBILAN : SEJARAH PEMERINTAH DAN KONSTITUSI INDONESIA.	153
PERTEMUAN KE SEPULUH : CIRI-CIRI DEMOKRASI INDONESIA.....	163
PERTEMUAN KE SEBELAS : DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945	177

PERTEMUAN KE DUA BELAS :	
KONSEPSI HUBUNGAN ANTARA PANCASILA DAN BANGSA MENURUT UUD 1945.....	188
PERTEMUAN KE TIGA BELAS :	
POLTRANAS DI INDONESIA	193
PERTEMUAN KE EMPAT BELAS :	
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA	201
PERTEMUAN KE LIMA BELAS :	
HAK ASASI MANUSIA (HAM).....	227
PERTEMUAN KE ENAM BELAS :	
KONSTITUSI.....	236

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DAFTAR ISI	245
BAB 1 PENGANTAR PENDIDIKAN	
KEWARGANEGARAAN	249
A. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dasar Kelompok MPK.....	249
B. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan	252
BAB 2 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PANDANGAN	
HIDUP BANGSA INDONESIA	255
A. Sejarah Pancasila	258
B. Pengertian Pancasila.....	260
BAB 3 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA	284
A. Latar Belakang.....	284
B. Ideologi Pancasila	286
C. Sejarah Ideologi Pancasila.....	287
D. Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi	289
E. Pancasila Sebagai Sumber Nilai.....	294
F. Implikasi Pancasila (Demokrasi)	297
G. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar	299
H. Pertanyaan.....	307
BAB 4 SEJARAH PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	309
A. Latar Belakang.....	309

B.	Rumusan Masalah	310
C.	Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	310
D.	Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia ..	312
E.	Kompetensi Pendidikan.....	313
F.	Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara	315
G.	Sistem Kenegaraan Di Indonesia	319
H.	Proses Bangsa Yang Menegara.....	319
I.	Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara	321
J.	Pemahaman Demokrasi.....	324
K.	Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia	326
L.	Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia	329
BAB 5	SEJARAH PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	331
A.	Pancasila.....	331
B.	Undang-Undang Dasar (UUD)	332
C.	Hak Asasi Manusia (HAM)	335
BAB 6	HAK ASASI MANUSIA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA.....	338
A.	Pengakuan Atas Martabat dan Hak-Hak Yang Sama Sebagai Manusia.....	338
B.	Penghargaan dan Pengakuan atas Hak-Hak Manusia dengan Perlindungan Hukum.....	339
C.	Proses Berbangsa dan Bernegara	341
D.	Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	342
E.	Makna Bela Negara dan Implementasi Bela Negara..	344
BAB 7	KONSEP DEMOKRASI DAN WAWASAN NUSANTARA	346
A.	Latar Belakang	346
B.	Sejarah dan Perkembangan Demokrasi.....	347
C.	Demokrasi di Indonesia	348
D.	Penerapan Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari.....	350
E.	Konsep Demokrasi	352
F.	Landasan-landasan Demokrasi	354
G.	Filosofis Wawasan Nusantara	355

H. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan.....	358
BAB 8 KETAHANAN NASIONAL POLITIK STRATEGI NASIONAL.....	361
A. Konsep Ketahanan Nasional yang Dikembangkan Untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Menuju Kejayaan Bangsa dan Negara	361
B. Fungsi Ketahanan Nasional Sebagai Kondisi Doktrin dan Metode dalam Kehidupan Berbangsa dan bernegara.....	362
C. Politik dan Strategi Nasional Sebagai Politik Nasional dan Strategi Nasional untuk Mengantisipasi Perkembangan Globalisasi Kehidupan dan Perdagangan Bebas.	362
D. Politik Nasional Sebagai Hakekat Materil Politik	364
BAB 9 KONSTITUSI INDONESIA (UUD 1945).....	367
A. Latar Belakang.....	367
B. Konstitusi Indonesia	368
C. Kelemahan Hasil Amandemen UUD 1945	372
D. Kesimpulan.....	374
BAB 10 ANALISIS UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN PASAL 1 s/d 18B	376
BAB 11 KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG	389
A. Proses dan Grand Design Amandemen UUD 1945 ...	392
B. Hasil-hasil Amandemen dan Implementasinya.....	397
C. Perubahan mendasar konsep kenegaraan	400
BAB 12 KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA	406
A. Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara	406
B. Pengertian Pancasila.....	407
C. Pengertian Pancasila Secara Etimologis.....	408
D. Pengertian secara Histori	408
E. Pengertian Pancasila Secara terminology histories....	408

BAB 13 PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG	
BANGSA DAN BELA NEGARA.....	411
A. Latar Belakang	411
B. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.....	412
C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia ..	414
D. Kompetensi Pendidikan.....	414
E. Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara	417
F. Proses Bangsa yang Menegara	421
G. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara	423
H. Pemahaman Demokrasi	426
I. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia	428
J. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia	431
K. Bela Negara.....	432
BAB 14 DAMPAK PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN	436
A. Latar Belakang Masalah.....	436
B. Dampak Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak Transparan	439
C. Faktor-Faktor Penyebab Pemerintah yang Tidak Transparan.	443
D. Penanganan Pemerintah yang Tidak Transparan.	445
E. Ciri-Ciri Pemerintahan yang Tidak Transparan.....	447
F. Bidang Bidang Yang Berdampak Pada Pemerintahan Yang Tidak Transparan.....	448
G. Kesimpulan.....	451
DAFTAR REFERENSI	452
TENTANG PENULIS.....	457



**MASTER BUKU AJAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**

A.Junaedi Karso



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DESKRIPSI MATA KULIAH PENDIDIKAN	
KEWARGANEGARAAN	5
PERTEMUAN PERTAMA :	
PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.....	8
PEREMUAN KEDUA :	
PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN NEGARA	13
PERTEMUAN KETIGA :	
SEJARAH PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	35
PERTEMUAN KEEMPAT :	
MEMBELA NEGARA.....	42
PERTEMUAN KE LIMA :	
PROSES PERUBAHAN DEMOKRASI DAN AMANDEMEN DI INDONESIA	46
PERTEMUAN KE ENAM :	
KELEMAHAN UUD 1945 PASCA 4 KALI AMANDEMEN	119
PERTEMUAN KE TUJUH :	
GEO POLITIK KONSTITUSI DI INDONESIA.....	129
PERTEMUAN KE DELAPAN :	
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT KONSTITUSI NEGARA.....	147
PERTEMUAN KE SEMBILAN :	
SEJARAH PEMERINTAH DAN KONSTITUSI INDONESIA	153
PERTEMUAN KE SEPULUH :	
CIRI-CIRI DEMOKRASI INDONESIA	163
PERTEMUAN KE SEBELAS :	
DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945.....	177
PERTEMUAN KE DUA BELAS :	
KONSEPSI HUBUNGAN ANTARA PANCASILA DAN BANGSA MENURUT UUD 1945.....	188

PERTEMUAN KE TIGA BELAS :	
POLTRANAS DI INDONESIA.....	193
PERTEMUAN KE EMPAT BELAS :	
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA.....	201
PERTEMUAN KE LIMA BELAS :	
HAK ASASI MANUSIA (HAM)	227
PERTEMUAN KE ENAM BELAS :	
KONSTITUSI.....	236

DESKRIPSI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	:	Pendidikan Kewarganegaraan
Nomor Kode	:	KU 105
Jumlah SKS	:	2 SKS (100 menit)
Semester	:	Kedua
Kelompok Mata Kuliah	:	MKU (Mata Kuliah Umum)
Jurusan/Program	:	Ilmu Pemerintahan /S1
Dosen	:	A. Junaedi

B. Tujuan Umum MK PKN

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan yang tinggi, mampu bertindak cerdas, berwawasan global, berjiwa patriotik, berfikir komprehensif-integral dengan berlandaskan Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

C. Deskripsi Isi MK PKN

Dalam perkuliahan ini dibahas esensi PKN (Landasan filosofis, historis, Visi, Misi, Tujuan, Kompetensi PKN), Dinamika Negara Kebangsaan, Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara, Kesadaran Berkonstitusi, Hak Asasi dan Kewajiban dasar Manusia, Kesadaran Berdemokrasi, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, Politik dan Strategi Nasional, Pembangunan Daerah dalam Kerangka NKRI.

D. Proses Pembelajaran

Pendekatan	:	Ekspositori dan Inquiri
Metode	:	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, Pemecahan Masalah.
Tugas	:	Evaluasi tiap Bahasan, Makalah, Presentasi dan Diskusi
Media	:	OHP, LCD, Jurnal.

PERTEMUAN KE EMPAT BELAS : PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Materi : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Media : Power Point/Buku Ajar/Sumber dan Referensi para Ahli

Aktifitas : Pemaparan/Diskusi Kelas/Tugas Kelompok dan Individu

A. Latar Belakang

Memahami latar belakang historis dan konseptual Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara sebelum melaksanakan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi formal dan konsekuensi logis dalam kedudukan kita sebagai warga negara. Karena kedudukan Pancasila sebagai dasar negara (filsafat negara), maka setiap warga negara wajib loyal kepada dasar negaranya.

B. Ideologi

1. Pengertian Ideologi

Kata ideologi berasal dari bahasa Latin (idea; daya cipta sebagai hasil kesadaran manusia dan logos; ilmu). Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari menurut Kaelan ‘idea’ disamakan artinya dengan cita-cita.

2. Peran Ideologi

Cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya suatu ideologi memiliki peranan sebagai berikut.



PENGANTAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

A.Junaedi Karso



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	245
BAB 1 PENGANTAR PENDIDIKAN	
KEWARGANEGARAAN	249
A. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dasar Kelompok MPK.....	249
B. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan	252
BAB 2 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PANDANGAN	
HIDUP BANGSA INDONESIA	255
A. Sejarah Pancasila	258
B. Pengertian Pancasila.....	260
BAB 3 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA.....	284
A. Latar Belakang.....	284
B. Ideologi Pancasila	286
C. Sejarah Ideologi Pancasila	287
D. Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi	289
E. Pancasila Sebagai Sumber Nilai.....	294
F. Implikasi Pancasila (Demokrasi)	297
G. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar	299
H. Pertanyaan.....	307
BAB 4 SEJARAH PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	309
A. Latar Belakang.....	309
B. Rumusan Masalah	310
C. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	310
D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia .	312
E. Kompetensi Pendidikan	313
F. Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara.....	315
G. Sistem Kenegaraan Di Indonesia.....	319
H. Proses Bangsa Yang Menegara	319
I. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara	321
J. Pemahaman Demokrasi	324
K. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia	326
L. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia	329

BAB 5 SEJARAH PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	331
A. Pancasila.....	331
B. Undang-Undang Dasar (UUD)	332
C. Hak Asasi Manusia (HAM)	335
BAB 6 HAK ASASI MANUSIA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA.....	338
A. Pengakuan Atas Martabat dan Hak-Hak Yang Sama Sebagai Manusia.....	338
B. Penghargaan dan Pengakuan atas Hak-Hak Manusia dengan Perlindungan Hukum.....	339
C. Proses Berbangsa dan Bernegara	341
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	342
E. Makna Bela Negara dan Implementasi Bela Negara..	344
BAB 7 KONSEP DEMOKRASI DAN WAWASAN NUSANTARA	346
A. Latar Belakang	346
B. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi.....	347
C. Demokrasi di Indonesia.....	348
D. Penerapan Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari.....	350
E. Konsep Demokrasi	352
F. Landasan-landasan Demokrasi.....	354
G. Filosofis Wawasan Nusantara	355
H. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan.....	358
BAB 8 KETAHANAN NASIONAL POLITIK STRATEGI NASIONAL	361
A. Konsep Ketahanan Nasional yang Dikembangkan Untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Menuju Kejayaan Bangsa dan Negara.....	361
B. Fungsi Ketahanan Nasional Sebagai Kondisi Dokrin dan Metode dalam Kehidupan Berbangsa dan bernegara.....	362
C. Politik dan Strategi Nasional Sebagai Politik Nasional dan Strategi Nasional untuk	

Mengantisipasi Perkembangan Globalisasi	
Kehidupan dan Perdagangan Bebas.	362
D. Politik Nasional Sebagai Hakekat Materil Politik.....	364
BAB 9 KONSTITUSI INDONESIA (UUD 1945).....	367
A. Latar Belakang.....	367
B. Konstitusi Indonesia	368
C. Kelemahan Hasil Amandemen UUD 1945	372
D. Kesimpulan.....	374
BAB 10 ANALISIS UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN PASAL 1 s/d 18B	376
BAB 11 KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG	389
A. Proses dan Grand Design Amandemen UUD 1945 ...	392
B. Hasil-hasil Amandemen dan Implementasinya.....	397
C. Perubahan mendasar konsep kenegaraan	400
BAB 12 KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA	406
A. Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara	406
B. Pengertian Pancasila.....	407
C. Pengertian Pancasila Secara Etimologis.....	408
D. Pengertian secara Histori	408
E. Pengertian Pancasila Secara terminology histories....	408
BAB 13 PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN BELA NEGARA	411
A. Latar Belakang.....	411
B. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	412
C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia .	414
D. Kompetensi Pendidikan	414
E. Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara.....	417
F. Proses Bangsa yang Menegara.....	421
G. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara	423
H. Pemahaman Demokrasi	426
I. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia	428

J. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia	431
K. Bela Negara.....	432
BAB 14 DAMPAK PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN	436
A. Latar Belakang Masalah.....	436
B. Dampak Penyelenggaran Pemerintah yang Tidak Transparan	439
C. Faktor-Faktor Penyebab Pemerintah yang Tidak Transparan.	443
D. Penanganan Pemerintah yang Tidak Transparan.	445
E. Ciri-Ciri Pemerintahan yang Tidak Transparan.....	447
F. Bidang Bidang Yang Berdampak Pada Pemerintahan Yang Tidak Transparan.....	448
G. Kesimpulan	451
DAFTAR REFERENSI	452
TENTANG PENULIS.....	457

BAB

1

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dasar Kelompok MPK

1. Pentingnya Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

Bawa di Negara maupun di dunia ini akan menginginkan Negara dan bangsanya tetap berdiri tegak, berbagai upaya akan dilakukan tidak terkecuali melalui dunia pendidikan, oleh karena itu dalam *General Education/Humanities* selalu ada materi sebagai pembekuan dasar sikap prilaku bangsanya, seperti di :

a. Amerika Serikat mempunyai:

History, Humanity, and Philosophy

b. Jepang mempunyai:

Japanese History, Ethics, Philosophy and Science Religion

c. Philipina mempunyai:

Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Philipina New Constitution, Study of Human Right

d. Indonesia mempunyai:

Agama, Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan

2. Rasionalisasi Pendidikan

Pendidikan hakekatnya sebagai upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah suatu Negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat, bangsa dalam Negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan dengan dinamika perubahannya karena adanya pengaruh global.

BAB

14

DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di masa orde baru korupsi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi demisional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral dipemerintahan.

Pemerintahan yang tidak transparan Menurut Poerwodarminto dalam KBBI , penyelenggaraan adalah suatu proses atau menyelenggarakan sesuatu. Pemerintahan dapat berarti proses. Cara atau perbuatan memerintah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan masyarakat dan kepentingan Negara. Bentuk-bentuk pemerintahan yang cenderung tidak transparan.

Adapun beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk dapat melahirkan pemerintahan tertutup yaitu sebagai berikut.

1. Monarki absolute
2. Tirani
3. Otokrasi
4. Oligarki

DAFTAR REFERENSI

- “<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>”
- “http://dondsor.blogster.com/demokrasi_dan_Konstitusi.html”
- Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II Jilid 2”. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd. 2005 “ Kewarganegaraan (Citizenship)”. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.
- Dahlan, Saronji, Drs. Dan H. Asy'ari, S.Pd, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VIII Jilid 2”. Jakarta: Erlangga.
- Sumarsono S.dkk.2002. *Pendidikan kewarganegaraan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lembaga Ketahanan Nasional. 1998. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad, Maskur.2003. *Pendidikan Kewaganegaraan Dalam Metode Praktis*. Palembang.
- Bagian proyek peningkatan tenaga akademik direktorat jendral pendidikan Tinggi DEPDIKNAS.2002. *Kapita selekta pendidikan kewarganegaraan Bag, 1*. Jakarta.
- Bagian proyek peningkatan tenaga akademik direktorat jendral pendidikan Tinggi DEPDIKNAS.2002. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan Bag. II*. Jakarta.
- Budianto, 2004 “Kewarganegaraan SMA kelas X”, Jakarta : Erlangga.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003 “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta : Balai Pustaka.
- Sunarso, Anis K., 2008. “Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas VI”, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- _____.2012. “Contoh Makalah PKn Bela Negara”.
- <http://hends25.blogspot.com/2011/09/contoh-makalah-pkn-bela-negara.html>, (online), (diakses 21 Juli 2012)

TENTANG PENULIS



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provision of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (International Jurnal of Social Science Humanities Research, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District*,

Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia*, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); *Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand*, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); *Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia*, (Journal L Sociale, 2020); *Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency*, (Journal La Bisecoman, 2020); *Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports*, (South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); *Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia*, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets*, (Journal La Sociale, 2020); *The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare*, (International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); *Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex*, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); *Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective*, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); *Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterpreses*, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan *Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service*, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju *good governance of bumdes* yang berdasarkan *prinsip government judgement rule* <http://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa>, 2021).

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika *Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun

2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi *"How to Perform While Transform"* di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaan Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo

NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN- Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN- Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003- 2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012- 2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202241338, 1 Juli 2022
Pencipta	
Nama	: Dr. A. Junaedji Karso, S.H., MH., M.Si
Alamat	: Dusun Kebon Randu I, RT. 005 RW. 001 Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indramayu, JAWA BARAT, 45256
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Dr. A. Junaedji Karso, S.H., MH., M.Si
Alamat	: Dusun Kebon Randu I, RT. 005 RW. 001 Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indramayu, JAWA BARAT, 45256
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: Master Buku Ajar Dan Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 1 Juli 2022, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, tefhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000356980

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.